

Karakteristik Komite Audit dan Penghindaran Pajak di Indonesia

Characteristics of Audit and Tax Avoidance Committees in Indonesia

Eugenia Ivana Kasetyo¹, An Nurrahmawati²✉

¹Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

²Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

✉Corresponding author: an_nurrahmawati@staff.uns.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh karakteristik komite audit: gender, keahlian keuangan, jabatan merangkap, independensi, dan usia terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia. Regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Sebanyak 245 sampel perusahaan yang tercatat di BEI Indonesia selama periode 2017-2021 digunakan. Beberapa variabel independen ditemukan tidak signifikan. Karakteristik berupa jenis kelamin, keahlian keuangan, independensi, dan usia komite audit secara positif mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Sementara itu, tenurial ganda tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Wawasan baru tentang pentingnya menimbang faktor non-ekonomi seperti karakteristik komite audit. Penyelenggara pajak perlu memperhatikan bagaimana karakteristik komite audit disusun. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada variabel tenurial ganda sebagai proksi uji untuk variabel karakteristik komite audit ditambahkan dan sampel komprehensif dari semua sektor non-keuangan di Indonesia digunakan.

Abstract

The purpose of this study is to examine the influence of audit committee characteristics: gender, financial expertise, tenure, independence, and age on tax avoidance practices in Indonesia. Multiple regression is used to test hypotheses. A total of 245 samples of companies listed on the IDX Indonesia during the 2017-2021 period were used. Some independent variables were found to be insignificant. Characteristics in the form of gender, financial expertise, independence, and age of the audit committee positively affect tax avoidance practices. Meanwhile, double tenure does not affect tax avoidance practices. New insights into the importance of weighing non-economic factors such as the characteristics of audit committees. Tax administrators need to pay attention to how the characteristics of the audit committee are structured. The novelty of this study lies in the dual tenure variable as a test proxy for the audit committee characteristic variable added and a comprehensive sample of all non-financial sectors in Indonesia used.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Eugenia Ivana Kasetyo, An Nurrahmawati.

Article history

Received 2024-10-15

Accepted 2025-01-20

Published 2025-01-31

Kata kunci

Penghindaran Pajak;
Komite Audit;
Tata Kelola
Perusahaan.

Keywords

Tax Avoidance;
Audit Committee;
Corporate Governance.

1. Pendahuluan

Negara dapat meningkatkan pendapatan dan menjalankan fungsi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik (Schönhärl dkk., 2022). Negara juga memiliki kekuasaan atas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dan berada di bawah yurisdiksi pemerintah untuk mematuhi semua aturan yang ditetapkan, terutama aturan mengenai sumber penghasilan yang sah dan resmi, yaitu pajak negara (Schönhärl dkk., 2022). Pajak adalah transfer wajib sumber daya yang dibayarkan oleh rumah tangga dan perusahaan ke satu atau lebih pemerintah negara bagian tanpa menerima manfaat khusus secara langsung. Eksandy (2017) menyatakan bahwa perusahaan selalu berusaha meningkatkan pendapatan bisnisnya dengan tetap meminimalkan pengeluaran yang ada. Perusahaan akan memanfaatkan dana secara efisien untuk mengurangi pengeluaran dan mendapatkan laba bersih yang tinggi. Namun, situasi ini seringkali tidak membawa perusahaan pada perlakuan pembayaran pajak secara umum. Dengan kata lain, perusahaan sering menggunakan taktik khusus untuk mengalihkan pengeluaran atau asetnya agar memiliki kewajiban yang ringan dalam pembayaran pajak, Eksandy (2017)

Wajib pajak melakukan penghindaran pajak untuk tujuan yang sama, yaitu untuk meminimalkan atau menghilangkan kewajiban pajak mereka. Tindakan ini sengaja dilakukan dengan melaporkan atau tidak melaporkan tanda terima atau klaim palsu yang digunakan untuk pemotongan (Frecknall-Hughes, 2017). Ini adalah tindakan memanfaatkan peluang hukum wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka (Frecknall-Hughes, 2017). Penghindaran pajak juga dapat dilakukan dengan mengurangi kewajiban untuk tidak membayar pajak, yang memiliki konsekuensi ekonomi; namun, wajib pajak harus memenuhi syarat untuk pengurangan kewajiban pajak mereka (Frecknall-Hughes, 2017). Penghindaran pajak kuantitatif dapat dihitung dengan melihat perubahan tarif pajak perusahaan yang sebenarnya dibandingkan dengan tarif pajak yang berlaku. Hal ini sering dilakukan dengan mengalihkan ke anak perusahaan dengan tarif pajak yang lebih rendah, mengalihkan utang, dan menempatkan aset tidak berwujud secara strategis, yang merupakan strategi perusahaan untuk menghindari pajak.

Dari sudut pandang ekonomi, penghindaran pajak berkontribusi pada krisis ekonomi yang mempengaruhi negara bahkan selama tahun-tahun pertumbuhan, sehingga aspek sistem perpajakan yang bermasalah dianggap merugikan perekonomian negara (Pittaki, 2021). Sebagai tambahan Pittaki (2021). Juga mengungkapkan bahwa penghindaran pajak muncul dari rendahnya kesadaran akan perilaku membayar pajak dan benar tindakan terhadap perpajakan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penghindaran pajak dapat dikategorikan sebagai reaksi yang tidak adil dan tidak dapat dipercaya terhadap kewajiban warga negara karena merupakan sistem yang tidak sah, tindakan amoral, dan praktik yang tidak dapat dibenarkan terlepas dari alasannya (Pittaki, 2021). Phyllis (2003) mengungkapkan bahwa negara berkembang sering mempraktikkan penghindaran pajak dengan penemuan data penurunan laba sebelum pajak sebesar 1,7% yang dilaporkan oleh perusahaan.

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia memberikan informasi bahwa motivasi 2000 perusahaan multinasional mengidentifikasi pelanggaran atau ketidaktaatan terhadap pembayaran pajak. Rata-rata, perusahaan tidak melaporkan PPh pasal 25 dan 29 karena mengalami kerugian terus menerus meskipun perusahaan masih ada (Maharani & Baroroh, 2019).

Tabel 1. Penerimaan Pajak Indonesia

Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Pajak	Presentase Penerimaan Pajak
2017	1.362	1.343	98%
2018	1.539	1.518	98%
2019	1.556	1.546	99%
2020	1.285	1.072	83%
2021	1.628	1.547	95%

Sumber: kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan (2018) juga menyatakan bahwa program pengampunan pajak juga mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak di Indonesia. Berdasarkan APBN 2018, hasil

program pengampunan pajak tersebut meliputi repatriasi aset sebesar Rp 146 triliun dan tebusan sebesar Rp 116 triliun. Salah satu upaya penghindaran pajak tercermin dari realisasi penerimaan pajak tahunan yang tidak pernah mencapai target. Menyadari bahwa itu kurang dari target dapat berarti bahwa Direktorat Jenderal Pajak masih perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya (Maharani & Baroroh, 2019). Oleh karena itu, struktur perusahaan atau lembaga yang memiliki kendali atas pengambilan keputusan sangat berpengaruh terkait manajemen perusahaan Delgado dkk. (2023). Tata kelola perusahaan membawa sistem, struktur, dan arah kinerja perusahaan jika pemilik dan manajer bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan dan mengatur kepemilikan saham mayoritas dan minoritas di perusahaan (Ernawati & Aryani, 2019). Studi empiris oleh Dalwai & Mohammadi (2020) mengkaji perlunya tata kelola perusahaan untuk mendukung pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang tepat berdasarkan kondisi perusahaan untuk menghasilkan kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Mekanisme tata kelola ada untuk melindungi kepentingan berbagai pemangku kepentingan, yang tidak boleh dilibatkan dalam manajemen bisnis karena pemisahan kepemilikan dan manajemen (Eragbhe & Igbinoba, 2021). Praktik penghindaran pajak tidak dianjurkan karena pemegang saham, sehingga pengawasan dilakukan oleh direksi dan komite audit dengan cara menekannya. Yunsen dkk. (2023) menyatakan bahwa pemegang kontrol perusahaan cenderung menekan praktik penghindaran pajak karena informasi keuangan yang dilaporkan dapat memberikan gambaran transparan tentang kondisi keuangan kepada pengguna eksternal perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mench2 & Hssouna (2022) menyatakan bahwa ada pengaruh yang timbul dari keberadaan komite audit terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan komite audit bertanggung jawab untuk mengurangi tingkat kecurangan dan mengelola pendapatan bagi perusahaan. Khaled dkk. (2023) Juga meneliti hal yang sama, di mana komite audit mengontrol perlakuan informasi keuangan, yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

Mench2 & Hssouna (2022) jelaskan itu agar efisien; Anggota dewan harus memiliki beberapa karakteristik seperti anggota independen, keragaman gender, latar belakang pendidikan, dan afiliasi politik anggota dewan. Selain itu, dewan harus mendelegasikan beberapa kegiatan pengawasan dan pengendaliannya kepada sub-komite, komite audit. Komite audit memiliki peran penting dalam perusahaan, membantu dewan dengan memberikan perhatian yang memadai terhadap manajemen risiko pajak (Mench2 & Hssouna, 2022). Hal ini dikarenakan informasi keuangan dan hal-hal terkait risiko dapat ditangani di tingkat komite audit sebelum disampaikan kepada dewan, sehingga menjadi tanggung jawab utama komite audit (Mench2 & Hssouna, 2022). Demikian pula, pemikiran yang dibagikan oleh Khelif & Achek (2017) menekankan pentingnya menghubungkan perbedaan gender dalam akuntansi dan audit karena berhubungan dengan peran dan status perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dalam manajemen puncak, direksi, dan komite audit akan membutuhkan jaminan audit yang lebih tinggi untuk menjaga reputasi mereka, yang pada gilirannya secara langsung mempengaruhi penilaian auditor terhadap kualitas pelaporan keuangan sehingga karakteristik latar belakang komite audit dapat dipastikan (Khelif & Achek, 2017). Lebih khusus lagi, penelitian yang dilakukan oleh Deslandes et al. (2020) membuktikan bahwa karakteristik komite audit dengan proksi independensi, pengalaman kerja sebelumnya, keberadaan perempuan di komite audit, dan keaktifan komite audit dalam mengambil peran lain sekaligus mempengaruhi menekan praktik penghindaran pajak (Deslandes dkk., 2020).

Karakteristik komite audit diambil dengan mengembangkan keterbatasan variabel gender, independensi, dan keahlian keuangan dari Dang & Nguyen (2022) penelitian, yaitu karakteristik usia dan kuren sebagai proksi karakteristik komite audit. Dang & Nguyen (2022) juga menyarankan untuk melakukan penelitian terkait penghindaran pajak di negara yang berbeda dari Vietnam, sehingga Indonesia dipilih karena beberapa alasan. A. Pham (2020) menyebutkan bahwa tarif pajak Vietnam sejak 2014 adalah 22%, lebih rendah dari Indonesia. Jadi, penelitian ini baru karena menunjukkan apakah negara yang lebih tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak. Selain itu, dari segi sistem ekonomi, ada perbedaan antara Vietnam dan Indonesia. Dutta (2015) menjelaskan bahwa Vietnam memiliki sistem ekonomi campuran, antara ideologi komunis dan sosialis, di mana pemerintah mengelola dan memiliki semua kegiatan ekonomi dan produksi. Pada saat yang sama, Indonesia menganut ekonomi Pancasila, yang berorientasi pada kerja sama dan

penguatan bersama berdasarkan hukum yang berlaku (Dutta, 2015). Hal ini mengacu pada arah kepatuhan hukum untuk saling mendukung kegiatan dan kebutuhan ekonomi masing-masing, terutama kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris keberadaan komite audit perempuan, yang dilihat secara eksplisit dari karakteristik yang ada, seperti anggota komite audit perempuan, usia, independensi, keahlian, dan jabatan merangkap lainnya tentang penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan dari semua sektor non-keuangan dan non-bank yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021. Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji hubungan antara pengaruh variabel independen terhadap praktik penghindaran pajak sebagai variabel dependen pada tahun 2017-2021. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan spesifik bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangannya dengan mempertimbangkan secara bijak struktur dewan dan praktik perpajakan ekonomi oleh peraturan perpajakan moral di Indonesia.

2. Metode

Studi ini menggunakan sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan informasi dari situs webnya. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan publik non-keuangan Indonesia dalam periode 2017-2021. Variabel dependen (Y) adalah penghindaran pajak yang diukur dengan estimasi perhitungan tarif pajak efektif tunai atau Tarif Pajak Efektif Tunai (CETR) (Mayndarto, 2022); Paramita dkk. (2023); Kimea dkk. (2023) dan Pratomo & Rana (2021):

$$\text{Tax Avoidance (CETR)} = \frac{\text{Tax Payment}}{\text{Profit Before Tax}}$$

Variabel independen pertama adalah karakteristik komite audit perempuan. Deslandes dkk. (2020) Menjelaskan bahwa pengukuran jenis kelamin dalam komite audit Perseroan digunakan untuk menghitung proporsi jumlah komite audit perempuan terhadap jumlah total komite audit di Perseroan. Pengukuran ini juga dilakukan oleh Ararat & Yurtoglu (2021) dan Riguen dkk. (2020).

$$FEM = \frac{\sum \text{Female Audit Committee}}{\text{Corporate Audit Committee}}$$

Variabel independen kedua adalah Karakteristik Usia Komite Audit. Anggota manajemen perusahaan dengan usia yang lebih dewasa cenderung melakukan banyak hal untuk pengambilan keputusan tergantung pada mencerminkan nilai, sikap, dan kognisi dalam kinerja perusahaan (Tanikawa dkk., 2017).

Variabel independen ketiga adalah Karakteristik Komite Audit yang menurut Dang & Nguyen (2022) dan Galal dkk. (2022) Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IND = \frac{\sum \text{Independent Audit Committee}}{\sum \text{Corporate Audit Committee}}$$

Variabel independen keempat dari penelitian ini adalah Karakteristik Keahlian Keuangan Komite Audit. Madi dkk. (2014) dan Dang & Nguyen, (2022) menyatakan bahwa pengukuran karakteristik keahlian keuangan komite audit dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$EXPERT = \frac{\sum \text{Audit Committee with Financial Expertise}}{\sum \text{Corporate Audit Committee}}$$

Variabel independen terakhir dari penelitian ini adalah Karakteristik Posisi Ganda Komite Audit. Haniffa & Cooke (2005) dan Madi dkk. (2014) mengungkapkan bahwa variabel ini dapat diukur dengan rumus berikut:

$$DOUBL = \frac{\sum \text{Audit Committee with Dual Position}}{\text{Corporate Audit Committee}}$$

Variabel kontrol yang digunakan adalah kualitas audit, komisaris independen, leverage, Return on assets, dan COVID-19. Kualitas audit Big Four diukur menggunakan variabel dummy untuk melihat apakah praktik penghindaran pajak dapat memengaruhi perusahaan untuk menerbitkan

laporan keuangan yang transparan dengan diaudit oleh KAP berkualitas tinggi dan memiliki aturan yang ketat (Kovermann & Velte, 2019). Menurut Eksandy (2017), variabel kontrol komisaris independen diukur dengan jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah komisaris yang dimiliki oleh Perseroan. Menurut Hasan dkk. (2021) Variabel kontrol leverage adalah rasio total utang terhadap total aset perusahaan untuk melihat apakah sumber pendanaan perusahaan berasal dari perusahaan eksternal atau internal. Variabel kontrol ROA diukur dengan rasio total laba bersih terhadap total aset perusahaan untuk melihat apakah langkah optimalisasi laba perusahaan dapat mengindikasikan penghindaran pajak (Harymawan dkk. (2023). Terakhir, variabel pengendalian COVID-19 diukur menggunakan variabel dummy untuk melihat apakah tahun yang terkena COVID-19 akan mengambil tindakan penghindaran pajak atau sebaliknya (Athira & Ramesh, 2023). Model regresi yang kami usulkan adalah sebagai berikut:

$$CETR = \alpha + \beta_1 FEM + \beta_2 USIA + \beta_3 IND + \beta_4 AHLI + \beta_5 DOUBL + \beta_6 AC + \beta_7 COM + \beta_8 LEV + \beta_9 ROA + \beta_{10} COV + \epsilon$$

Dimana:

CETR	= Tarif Pajak Efektif Tunai
Sebuah	= Konstanta
E	= Istilah Kesalahan
FEM	= Karakteristik Komite Audit Perempuan
UMUR	= Karakteristik Usia Komite Audit
IND	= Karakteristik Independensi Komite Audit
AHLI	= Keahlian Keuangan Komite Audit
DOUBL	= Karakteristik Posisi Ganda Komite Audit
Suhu AC	= kualitas audit (Big 4)
COM	= Komisaris Independen
LEV	= Manfaat
ROA	= Pengembalian Aset
COV	= Covid-19

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan semua perusahaan non-keuangan di Indonesia sebagai populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling yang memperoleh 443 perusahaan dari tahun 2017 hingga 2021 atau 2213 pengamatan.

Tabel 2. Kriteria dan Jumlah Sampel yang Digunakan

TIDAK	Deskripsi	Seluruh
1.	Perusahaan non-keuangan yang tercatat di BEI pada 2017-2021	549
2.	Perusahaan non-keuangan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan lengkap pada tahun 2017-2021	(25)
3.	Perusahaan non-keuangan yang mengalami kerugian pada tahun 2017-2021	(130)
Jumlah perusahaan yang sesuai dengan kriteria		349
Total pengamatan selama 5 tahun dengan 349 perusahaan		1225

Dari uji deskriptif statistik pada Tabel 2, kita mengetahui bahwa PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI), perusahaan yang bergerak di bidang produksi bir di Indonesia, memiliki nilai CETR terbesar, yaitu 0,882647 dan terjadi pada tahun 2017. Sementara itu, perusahaan yang memiliki nilai CETR terendah adalah PT Bayu Buana Tbk (BAYU) yaitu 0,017029 dan terjadi pada tahun 2020.

Tabel 3. Tabel Statistik Deskriptif

Variabel	N	Berarti	Std Deviasi	Min	Maks
CETR	2213	0.292283	1.163037	0.007081	0.882647
FEM	2213	0.341756	0.237529	0.000000	1.000000
UMUR	2213	48.441141	24.613629	33.666667	62.000000
IND	2213	0.809099	0.455616	0.333333	1.000000
AHLI	2213	0.730180	0.462065	0.000000	1.000000
DOBEL	2213	0.171801	0.376442	0.000000	1.000000
Suhu AC	2213	0.231981	0.422192	0.000000	1.000000
COM	2213	0.194144	0.754891	0.000000	1.000000
LEV	2213	0.883337	1.438159	0.009756	2.991993
ROA	2213	0.046040	0.112518	0.008544	0.717664
COV	2213	0.282432	0.450284	0.000000	1.000000

Kami juga menemukan bahwa enam perusahaan memiliki anggota komite audit yang seluruhnya perempuan, yaitu PT Copper Mulia Semanan Tbk (TBMS), PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA), PT Batavia Prosperindo Trans Tbk (BPTR), PT NFC Indonesia Tbk (NFCX), PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk (SCCO), dan PT Agung Semesta Sejahtera Tbk (TARA) pada periode 2017-2021. Perusahaan tertua adalah PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk (PDES), dan yang termuda adalah PT Sekar Laut Tbk (SKLT). Perusahaan dengan nilai COM terbesar adalah PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) pada tahun 2017 dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) pada tahun 2017-2021. Perusahaan yang memiliki nilai COM terendah adalah PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) pada periode 2017-2021, PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) pada tahun 2017, dan PT Pikko Land Development Tbk (RODA) pada tahun 2017.

Perusahaan dengan nilai LEV terbesar adalah PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (SULI) pada tahun 2017. Sementara itu, perusahaan dengan nilai LEV terendah adalah PT Binakarya Jaya Abadi (BIKA) pada tahun 2021. Perusahaan dengan nilai ROA terbesar adalah PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) pada tahun 2021 dan PT Alkindo Naratama Tbk (ALDO) pada tahun 2020. Sementara itu, perusahaan dengan nilai ROA terendah adalah PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) pada tahun 2018.

Tabel 4. Uji Koefisien Penentuan (R²)

R-kuadrat	0.832124	Akar MSE	0.292283
R-kuadrat yang disesuaikan	0.609010	Var dependen rata-rata	0.109094
SE regresi	0.122330	S.D. bergantung var	0.472716
Jumlah kuadrat resid	26.33794	Kriteria info Akaike	0.266320
Kemungkinan log	1762.895	Kriteria hitam	-1.183818
F-statistik	19.30069	Kriteria Hannan-Quinn.	-0.016600
Prob(F-statistik)	0.000000	Statistik Durbin-Watson	-0.757432

Dari data Tabel 3, kita mengetahui bahwa nilai R-square yang disesuaikan adalah 0,789010, yang berarti bahwa pengaruh variabel independen pada variabel dependen adalah 60,90%, sedangkan 39,10% dipengaruhi oleh indikator lain yang tidak disebutkan dalam penelitian. Konsep koefisien determinasi bertujuan untuk melihat ukuran hubungan linier antara dua variabel dan terletak antara -1 dan +1. Ini menunjukkan proporsi variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh model regresi. Koefisien uji determinasi dapat cocok jika kuantitasnya menjauh dari 1 (Rambut JR dkk., 2009). Tabel 3 juga menunjukkan nilai probabilitas statistik-F. Pengujian signifikansi simultan, atau uji F, bertujuan untuk melihat apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen bersama-sama (Gujarati & Porter, 2013). Uji-F menunjukkan nilai 0,000722, sehingga model regresi cocok.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien	Kesalahan STD.	t-Statistik	Prob.
C	0.738184	0.024445	30.19810	0.0000
FEM	0.104492	0.039669	-2.634120	0.0042
UMUR	0.002569	0.000526	-4.880162	0.0000
IND	0.095563	0.021093	-4.530459	0.0000
AHLI	0.170286	0.022872	-7.445096	0.0000
DOBEL	0.016087	0.016774	0.959065	0.1688
Suhu AC	-0.023264	0.006447	-1.140876	0.1124
COM	-0.007355	0.019158	-1.214300	0.1225
LEV	-0.000866	0.030844	-3.535093	0.1981
ROA	0.109036	0.001021	0.848526	0.0002
COV	0.053539	0.006219	-8.608440	0.0000

Hasil pengujian hipotesis di atas menunjukkan bahwa variabel gender komite audit (FEM), variabel usia komite audit (AGE), variabel independensi komite audit (IND), dan variabel keahlian keuangan komite audit (EXPERT) menunjukkan nilai yang signifikan dengan arah positif. Sementara itu, Karakteristik Posisi Ganda Komite Audit (DOUBLE) tidak berpengaruh signifikan.

Temuan mengenai variabel gender (FEM) komite audit (H1) memiliki efek positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini memiliki nilai probabilitas 0,0042, lebih kecil dari kriteria signifikansi 5% ($<0,05$). Nilai koefisien regresi menunjukkan nilai 0,104492 dengan arah positif. Hal ini menandakan bahwa komite audit perempuan dapat meningkatkan efektivitas komite audit perusahaan dalam menekan penghindaran pajak. Jadi, dapat diartikan bahwa jika variabel gender komite audit dalam penelitian ini lebih tinggi proporsionalnya, maka nilai CETR di perusahaan akan lebih tinggi. Semakin tinggi nilai CETR, semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan. Namun, sebaliknya, jika proporsi komite audit variabel gender, praktik penghindaran pajak akan meningkat.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dang dan Nguyen (2022), yang menyatakan bahwa keragaman gender dalam komite audit perusahaan secara signifikan mempengaruhi penghindaran pajak. Abbott dkk. (2012) menyatakan bahwa keragaman gender dapat secara signifikan mempengaruhi strategi dan kinerja perusahaan dan membantu menghindari penipuan karena kehadiran perempuan di dewan direksi secara signifikan berkontribusi pada pelaporan informasi keuangan dan efektivitas kinerja dewan dengan aturan yang benar. Artinya, perbedaan gender secara signifikan mempengaruhi salah satu komponen tata kelola perusahaan yang baik (Ernawati & Aryani, 2019). Selain itu, komite audit perempuan dalam struktur dewan dapat memfasilitasi pembuatan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan dapat dipercaya, dapat menyebabkan insiden pelanggaran modal yang lebih rendah terhadap hukum dan peraturan pasar, dan mengurangi penimbunan berita negatif dan penurunan harga saham terkait staking. Ararat & Yurtoglu (2021) mengungkapkan bahwa kehadiran komite audit perempuan dapat meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan sehingga dapat mengendalikan praktik penghindaran pajak.

Hipotesis kedua kami mengenai karakteristik usia juga didukung, sehingga signifikan ke arah yang positif. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi variabel usia rata-rata komite audit, semakin tinggi nilai CETR di perusahaan. Semakin tinggi nilai CETR, semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan. Namun, sebaliknya, jika panitia audit bervariasi usia, praktik penghindaran pajak akan meningkat. Tanikawa dkk. (2017) menyatakan bahwa perusahaan dan sering dikaitkan dengan sikap konservatif dan kaku dalam pekerjaannya yang tahan terhadap perubahan. Usia seseorang juga mencerminkan pengalaman anggota perusahaan, kerangka kognitif, penerimaan kemajuan teknologi, peluang, dan risiko yang dihadapi (Shaipah et al., 2018). Selain itu, manajemen mengharapkan eksekutif muda untuk menunjukkan lebih banyak perilaku terkait inovasi daripada anggota yang lebih tua (Shaipah et al., 2018). Hal ini dikarenakan anggota yang lebih muda cenderung lebih berani dalam memperkaya pengalaman dan pengetahuan mereka serta lebih adaptif terhadap lingkungan perusahaan. Hasil kami juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ellwart dkk. (2013) Yang menyatakan bahwa semakin tinggi (lebih tua) usia seseorang, semakin

rendah keinginan seseorang untuk mengeksplorasi hal-hal baru di luar kemampuannya sehingga ia akan cenderung meminimalisir tindakan yang merugikan.

Hipotesis ketiga mengenai Karakteristik Independensi Komite Audit juga didukung dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi variabel independensi komite audit, maka semakin tinggi nilai CETR di perusahaan. Semakin tinggi nilai CETR, semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan. Namun, sebaliknya, jika proporsi variabel independensi komite audit, penghindaran pajak akan meningkat.

Tingkat independensi dewan direksi perusahaan sangat berpengaruh dalam memantau sistem manajemen dan penerapan perencanaan perusahaan karena merupakan atribut penting dari seorang anggota dewan direksi (PH Hsu dkk., 2018); (Mench2 & Hssouna, 2022). Dengan proporsi independensi komite audit yang tinggi, perusahaan akan memiliki lebih sedikit peluang untuk melakukan fraud karena independensi tata kelola perusahaan berperan dalam memantau kinerja manajer. Selain itu, independensi memberikan status sosial pada tata kelola perusahaan, memungkinkannya untuk lebih memperhatikan reputasi jangka panjang dan efek dari keputusan manajemen, sehingga pilihan keputusan harus tepat (Chan dkk. (2013). Tata kelola perusahaan yang independen juga diperlukan untuk memberikan wawasan dalam memecahkan masalah bisnis yang kompleks dan menghindari risiko terhadap kondisi perusahaan (Triwacananingrum & Wijaya, 2022). Selain itu, independensi dewan dan tata kelola perusahaan memberikan pemantauan yang lebih efektif dan bermanfaat karena dapat mengambil keputusan terbaik dalam menghindari kepailitan dan menekan penipuan (Y. Hsu & Yang, 2020). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti De Vlaminck & Sarens (2015); Boussaidi & Hamed-Sidhom (2021); Mench2 & Hssouna (2022);

Hipotesis keempat kami mengenai keahlian komite audit didukung dengan arah positif. Jadi, dapat diartikan bahwa semakin tinggi proporsi variabel keahlian keuangan komite audit, semakin tinggi nilai CETR di perusahaan. Semakin tinggi nilai CETR, semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan. Di sisi lain, semakin rendah proporsi variabel keahlian keuangan komite audit, semakin banyak praktik penghindaran pajak yang akan meningkat. Diperlukan keahlian dalam menganalisis laporan keuangan dan membatasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Zalata dkk., 2018). Semakin banyak komite audit yang berpengalaman dalam analisis akuntansi fundamental, keuangan, dan perpajakan yang dimiliki oleh perusahaan, semakin tinggi pula kinerja tata kelola perusahaan dalam menekan praktik penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan yang memiliki komite audit yang berpengalaman dalam jabatan direktur atau keanggotaan di dewan direksi lain, seperti komisaris, memiliki dampak yang sangat baik terhadap upaya pemantauan kinerja tata kelola perusahaan (Deslandes dkk., 2020). Temuan kami selaras dengan penelitian sebelumnya seperti Hijau & Homroy (2018); Apriliyana & Suryarini (2018); Dang & Nguyen (2022); Zalata dkk., (2018).

Hipotesis terakhir kami mengenai Karakteristik Posisi Ganda Komite Audit tidak didukung dan temuan ini sejalan dengan Morck dkk. (1988); Fich & Shivdasani (2004); dan Sun dkk. (2011) yang menyebutkan jabatan ganda dalam komite audit dianggap mengganggu kinerja dan efektivitas kinerja tata kelola perusahaan. Hal ini juga dapat disebabkan oleh penunjukan anggota komite audit yang merangkap sebagai direktur yang aktif atau pensiun pensiun (Fich & Shivdasani, 2004). Sebagai tambahan J. Lagu & Windram (2005) menyatakan bahwa komite audit yang memegang jabatan rangkap akan membutuhkan bantuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja tata kelola perusahaan. Hal ini juga dapat terjadi jika anggota komite audit yang merangkap jabatan hanya memiliki pengaruh kecil atau bahkan tidak berpengaruh terhadap efektivitas tata kelola perusahaan dalam menangani penghindaran pajak

Variabel kontrol yang memiliki pengaruh signifikan adalah variabel menguntungkan (ROA) dan variabel COVID-19, keduanya memiliki efek positif terhadap penghindaran pajak. ROA dihitung dari laba bersih dibagi dengan total aset seluruh perusahaan, sehingga ketika proporsi ROA besar, dapat diindikasikan bahwa perusahaan memiliki laba yang besar. Jumlah pembayaran pajak juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan semakin tinggi laba perusahaan, semakin besar beban pajak yang perlu dibayar perusahaan, sehingga akan semakin kecil peluang penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Araújo dkk. (2019) dan Dewinta & Setiawan (2016) menyatakan

bahwa ROA secara signifikan berdampak positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.

Pandemi COVID-19 memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Studi ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan tidak berada dalam masa pandemi, perusahaan cenderung mempraktikkan penghindaran pajak. Namun, ketika pandemi COVID-19 melanda, perusahaan akan cenderung tidak mempraktikkan penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh kemampuan pemerintah dalam menangani dampak buruk selama pandemi dan memberikan regulasi adaptif untuk memulihkan kesehatan dan perekonomian (Athira & Ramesh, 2023). Pemerintah membutuhkan dana untuk memerangi ketimpangan ekonomi, tantangan iklim, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat sehingga wajib pajak diharapkan terus membayar pajak secara adil dalam mendukung kinerja pemerintah. Sehingga, perusahaan juga perlu menyusun strategi dalam menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi global sementara pemerintah terus menyesuaikan regulasi perpajakannya.

4. Simpulan

Penelitian ini menyelidiki dampak karakteristik komite audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2021. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa pertama, komite audit yang didominasi oleh perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengurangan praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang terlibat dalam komite audit, semakin sedikit praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan komite audit perempuan untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan menghindari risiko, mencegah praktik kecurangan dalam manajemen perusahaan. Kedua, usia anggota komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Komite audit yang lebih tua cenderung memiliki pengetahuan yang lebih luas dan membuat keputusan yang lebih konservatif untuk menjaga stabilitas perusahaan, mengurangi kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Ketiga, independensi komite audit juga berperan penting dalam mengurangi praktik penghindaran pajak. Semakin independen komite audit, semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak karena efektivitasnya dalam menganalisis informasi keuangan dan mencegah praktik tersebut. Keempat, keahlian keuangan dalam komite audit berdampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Anggota komite audit dengan latar belakang dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan dapat mendeteksi upaya manajemen untuk meminimalkan pajak dengan lebih baik, sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak. Kelima, meskipun jabatan merangkap di komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun mereka memiliki arah yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak signifikan, jabatan merangkap dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan di perusahaan.

Referensi

- Abbott, LJ, Parker, S., & Presley, TJ (2012). Kehadiran dewan perempuan dan kemungkinan representasi keuangan. *Cakrawala Akuntansi*, 26(4), 607-629. <https://doi.org/10.2308/acch-50249>
- Apriliyana, N., & Suryarini, T. (2018). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas CSR terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Analisis Akuntansi*, 7(3), 159-167. <https://doi.org/10.15294/aaj.v7i3.20052>
- Ararat, M., & Yurtoglu, BB (2021). Direktur wanita, komite dewan, dan kinerja perusahaan: Bukti deret waktu dari Turki. *Ulasan Pasar Berkembang*, 48, 100768. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2020.100768>
- Araújo, VC, Góis, AD, De Luca, MMM, & de Lima, GASF (2019). Narsisme CEO dan penghindaran pajak perusahaan. *Majalah Akuntansi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.1590/1808-057x202009800>
- Athira, A., & Ramesh, VK (2023). COVID-19 dan penghindaran pajak perusahaan : Bukti internasional ☆. Mei.
- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2021). Karakteristik dewan, sifat kepemilikan, dan agresivitas pajak perusahaan: bukti baru dari konteks Tunisia. *Jurnal Bisnis EuroMed*, 16(4), 487-511. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>

- Chan, KH, Mo, PLL, & Zhou, AY (2013). Kepemilikan pemerintah, tata kelola perusahaan, dan agresivitas pajak: Bukti dari Tiongkok. *Akuntansi dan Keuangan*, 53(4), 1029-1051. <https://doi.org/10.1111/acfi.12043>
- Dalwai, T., & Mohammadi, SS (2020). Modal intelektual dan tata kelola perusahaan: evaluasi perusahaan sektor keuangan Oman. *Jurnal Modal Intelektual*, 21(6), 1125-1152. <https://doi.org/10.1108/JIC-09-2018-0151>
- Dang, VC, & Nguyen, QK (2022). Karakteristik komite audit dan penghindaran pajak: Bukti dari ekonomi yang sedang berkembang. *Ekonomi dan Keuangan yang Menarik*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263>
- De Vlaminck, N., & Sarens, G. (2015). Hubungan antara karakteristik komite audit dan kualitas laporan keuangan: bukti dari Belgia. *Jurnal Manajemen dan Tata Kelola*, 19(1), 145-166. <https://doi.org/10.1007/s10997-013-9282-5>
- Delgado, FJ, Fernández-Rodríguez, E., García-Fernández, R., Landajo, M., & Martínez-Arias, A. (2023). Penghindaran pajak dan manajemen pendapatan: pendekatan jaringan saraf untuk ekonomi Eropa terbesar. *Inovasi Keuangan*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00424-8>
- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2020). Karakteristik komite audit dan agresivitas pajak. *Jurnal Audit Manajerial*, 35(2), 272-293. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1615.
- Dutta, M. (2015). Ekonomi Asia dan uang Asia. Dalam *Kontribusi untuk Analisis Ekonomi* (Vol. 287). [https://doi.org/10.1108/S0573-8555\(2009\)0000287005](https://doi.org/10.1108/S0573-8555(2009)0000287005)
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Ellwart, T., Bu, S., & Rack, O. (2013). Mengelola pertukaran pengetahuan dan identifikasi dalam tim yang beragam usia. <https://doi.org/10.1108/JMP-06-2013-0181>
- Eragbhe, E., & Igbinoba, O. O. (2021). Tata kelola perusahaan dan agresivitas pajak perusahaan: analisis komparatif. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Administrasi*, 5(1).
- Ernawati, D., & Aryani, YA (2019). Pemegang saham pengendali, karakteristik komite audit, dan pengungkapan transaksi pihak terkait: Bukti dari Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 23(1), 14-28. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v23i1.2701>
- Fich, EM, & Shivdasani, A. (2004). Apakah Papan Sibuk Monitor yang Efektif? Seri Kertas Kerja ECGI dalam Keuangan. Seri Kertas Kerja ECGI dalam Keuangan.
- Frecknall-Hughes, J. (2017). Perspektif Sejarah dan Hukum Kasus tentang Penghindaran Pajak. Dalam *The Routledge Companion to Tax Avoidance Research*. <https://doi.org/10.4324/9781315673745-2>
- Galal, HM, Soliman, MM, & Bekheit, MB(2022). Hubungan antara Karakteristik Komite Audit dan Manajemen Pendapatan: Bukti dari Perusahaan yang Terdaftar di Pasar Saham Mesir. *Jurnal Manajemen Industri dan Bisnis Amerika*, 12(09), 1439-1467. <https://doi.org/10.4236/ajibm.2022.129080>
- Hijau, CP, & Homroy, S. (2018). Direktur wanita, komite dewan, dan kinerja perusahaan. *Tinjauan Ekonomi Eropa*, 102, 19-38. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2017.12.003>
- Gujarati, D., & Porter, D. (2013). *Ekonometrika Dasar*. Dalam N. Fox (ed.), *Ekonometrika Pengantar: Pendekatan Praktis*. Douglas Reiner.
- Rambut JR, J. F., Hitam, W. C., J.Babin, B., & Anderson, R. E. (2009). *Analisis Data Multivariat* (Edisi ke-7) (hlm. 161). Aula Prentice.
- Haniffa, RM, & Cooke, TE (2005). Dampak budaya dan tata kelola terhadap pelaporan sosial perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 24.
- Harymawan, I., Anridho, N., Minanurohman, A., Ningsih, S., Kamarudin, KA, & Raharjo, Y. (2023). Apakah lebih banyak CEO berwajah maskulin mencerminkan lebih banyak penghindaran pajak? Bukti dari

- Indonesia. *Bisnis dan Manajemen yang Kompeten*, 10(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2171644>
- Hasan, MM, Lobo, GJ, & Qiu, B. (2021). Modal organisasi, penghindaran pajak perusahaan, dan nilai perusahaan. *Jurnal Keuangan Perusahaan*, 70(Agustus 2020).
<https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.102050>
- Hsu, PH, Moore, JA, & Neubaum, DO. (2018). Penghindaran pajak, ahli keuangan di komite audit, dan strategi bisnis. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 45(9-10), 1293-1321. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12352>
- Hsu, Y., & Yang, Y. (2020). Tata kelola perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan selama pandemi COVID-19. *Surat Penelitian Keuangan*, Januari.
- Khaled, A., Fatma, WBMD, & Mouna, G. (2023). Dampak mekanisme tata kelola perusahaan internal dan eksternal terhadap agresivitas pajak: bukti dari Tunisia. *Jurnal Akuntansi di Ekonomi Berkembang*, 13, 43-68. <https://doi.org/https://doi-org.unslib.idm.oclc.org/10.1108/JAEE-01-2021-0019>
- Khlif, H., & Achek, I. (2017). Gender dalam penelitian akuntansi: sebuah tinjauan. *Jurnal Audit Manajerial*, 32(6), 627-655. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2016-1319>
- Kimea, AJ, Mkhize, M., & Maama, H. (2023). Faktor Sosial Budaya dan Kelembagaan yang mempengaruhi Penghindaran Pajak di Afrika sub-Sahara. *Bisnis dan Manajemen yang Kompeten*, 10(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2186744>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). Dampak tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan – Tinjauan literatur. *Jurnal Akuntansi Internasional, Audit dan Perpajakan*, 36.
<https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100270>
- Madi, HK, Ishak, Z., & Manaf, NAA (2014). Dampak Karakteristik Komite Audit terhadap Pengungkapan Sukarela Perusahaan. *Procedia - Ilmu Sosial dan Perilaku*, 164(Desember), 486-492.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.106>
- Maharani, FS, & Baroroh, N. (2019). *Jurnal Analisis Akuntansi Pengaruh Leverage, Karakter Eksekutif, dan Kepemilikan Kelembagaan terhadap Penghindaran Pajak Dengan Hubungan Politik sebagai Moderasi* INFO ARTIKEL ABSTRAK. *Jurnal Analisis Akuntansi*, 8(2), 81-87.
<https://doi.org/10.15294/aaj.v8i2.30039>
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6, 426-442.
- Menchaoui, I., & Hssouna, C. (2022). Dampak mekanisme tata kelola internal terhadap agresivitas pajak: bukti dari perusahaan Prancis yang terdaftar di CAC 40. *Jurnal Bisnis EuroMed*.
<https://doi.org/10.1108/EMJB-03-2022-0047>
- Morck, R., Shleifer, A., & Vishny, RW (1988). Kepemilikan Manajemen dan Penilaian Pasar. *Jurnal Ekonomi Keuangan*, 20, 293-315.
- Paramita, AS, Ardiansah, MN, & Delyuzar, RA (2023). Analisis leverage, pengembalian aset, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *Jurnal Analisis Akuntansi*, 11(26), 186-195.
<https://doi.org/10.15294/aaj.v11i3.61617>
- Standar, A. (2020). Efek pemotongan pajak penghasilan badan sementara: Bukti dari Vietnam. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 146(April). <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2020.102476>
- Phyllis, LLM (2003). Penghindaran Pajak dan Langkah-langkah Anti-Avoidance di Ekonomi Berkembang Utama. Praeger.
- Pittaki, Z. (2021). Mengeksplorasi Akar Penghindaran Pajak Sistematis di Yunani. *Bisnis, Sistem Perpajakan dan Hati Nurani Pajak*, 1955-2008.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91-103.
- Riguen, R., Salhi, B., & Jarboui, A. (2020). Apakah perempuan di dewan mewakili penghindaran pajak perusahaan yang lebih sedikit? Analisis moderasi. *Jurnal Internasional Sosiologi dan Kebijakan Sosial*, 40(1-2), 114-132. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2019-0211>

- Schönhärl, K., Hürlimann, G., & Rohde, D. (2022). Sejarah penghindaran, penghindaran, dan perlawanan pajak. Dalam *Sejarah Penghindaran, Penghindaran dan Perlawanan Pajak*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003333197>
- Shaipah, N., Wahab, A., Ntim, CG, Muttaqin, M., & Adnan, M. (2018). Jurnal Akuntansi Internasional, heterogenitas tim manajemen puncak, perubahan tata kelola dan. *Jurnal Akuntansi Internasional, Audit dan Perpajakan*, 32, 30–46.
- Song, J., & Windram, B. (2005). Benchmarking Efektivitas Komite Audit di Inggris. *Jurnal Elektronik SSRN*, 205, 195–205. <https://doi.org/10.2139/ssrn.249865>
- Sun, J., Liu, G., & Lan, G. (2011). Apakah jabatan direktur perempuan di Komite Audit Independen Membatasi Manajemen Pendapatan? *Jurnal Etika Bisnis*, 99(3), 369–382. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0657-0>
- Tanikawa, T., Kim, S., & Jung, Y. (2017). Keragaman tim manajemen puncak dan kinerja perusahaan: mengeksplorasi fungsi usia. *Manajemen Kinerja Tim*, 23(3–4), 156–170. <https://doi.org/10.1108/TPM-06-2016-0027>
- Triwacananingrum, W., & Wijaya, G. M. (2022). Pelaporan Keberlanjutan dan Agresivitas Pajak Sebelum dan Selama Covid-19: Variabel Moderasi GCG. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 96–119. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.05>
- Yunsen, C., Jianqiao, H., Xiao, L., & Xiaoran, N. (2023). *Surat Penelitian Keuangan*. Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103770>
- Zalata, AM, Tauringana, V., & Tingbani, I. (2018). Keahlian keuangan komite audit, jenis kelamin, dan manajemen pendapatan: Apakah jenis kelamin ahli keuangan itu penting? *Tinjauan Internasional Analisis Keuangan*, 55.
- Zalata, Alaa Mansour, Tauringana, V., & Tingbani, I. (2018). Keahlian keuangan komite audit, jenis kelamin, dan manajemen pendapatan: Apakah jenis kelamin ahli keuangan itu penting? *Tinjauan Internasional Analisis Keuangan*, 55 (Maret 2017), 170–183. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2017.11.002>